



## Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Tingkat Kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran terhadap IPM di Indonesia

Rifky Tria Resmana<sup>1\*</sup>, Romi Gunawan<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup>Universitas Bengkulu, Indonesia

Alamat: Jl.W.R.Supratman, Kandang Limun, Bengkulu

Korespondensi penulis: [rifkytriaresmana@gmail.com](mailto:rifkytriaresmana@gmail.com)\*

**Abstract.** *This study aims to analyze the influence of the Provincial Minimum Wage (UMP), Poverty Rate (TK), and Unemployment Rate (TPT) on the Human Development Index (HDI) in five provinces of Indonesia categorized as having moderate HDI from 2014 to 2023. The research employs a panel data regression method using the Fixed Effect Model (FEM) approach to capture variations across regions and time. The findings reveal that the UMP has a positive and significant impact on HDI, indicating that higher minimum wages contribute to improvements in human development. In contrast, the TPT negatively and significantly affects HDI, suggesting that higher unemployment rates hinder human development progress. Meanwhile, the TK variable shows no significant effect on HDI, implying that changes in poverty rates during the study period did not directly influence human development levels in these provinces. Furthermore, the results of the regression analysis show that UMP, TK, and TPT simultaneously have a significant impact on HDI, with an overall contribution of 98.65%. The remaining 1.35% is attributed to other factors not included in the research model. These results highlight the importance of policies aimed at increasing minimum wages and reducing unemployment to enhance community welfare and accelerate human development in provinces with moderate HDI. Policymakers are encouraged to design comprehensive strategies that prioritize employment creation and wage improvements as key levers for boosting human development outcomes across regions.*

**Keywords:** HDI; Poverty Rate; Provincial Minimum Wage; Unemployment Rate

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP), Tingkat Kemiskinan (TK), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di lima provinsi di Indonesia yang dikategorikan memiliki IPM sedang pada tahun 2014 hingga 2023. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM) untuk menangkap variasi antar wilayah dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMP berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, yang mengindikasikan bahwa peningkatan upah minimum berkontribusi terhadap perbaikan pembangunan manusia. Sebaliknya, TPT berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, menunjukkan bahwa meningkatnya tingkat pengangguran menghambat kemajuan pembangunan manusia. Sementara itu, variabel TK tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM, yang mengisyaratkan bahwa perubahan tingkat kemiskinan selama periode penelitian tidak secara langsung mempengaruhi tingkat pembangunan manusia di provinsi-provinsi tersebut. Selain itu, hasil analisis regresi menunjukkan bahwa UMP, TK, dan TPT secara simultan berpengaruh signifikan terhadap IPM dengan kontribusi sebesar 98,65%, sedangkan sisanya sebesar 1,35% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Temuan ini menekankan pentingnya kebijakan yang berfokus pada peningkatan upah minimum dan pengurangan tingkat pengangguran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan manusia di provinsi dengan kategori IPM sedang. Pembuat kebijakan didorong untuk merancang strategi komprehensif yang memprioritaskan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan upah sebagai kunci peningkatan pembangunan manusia di berbagai daerah.

**Kata kunci:** IPM; Tingkat Kemiskinan; Tingkat Pengangguran; Upah Minimum Provinsi

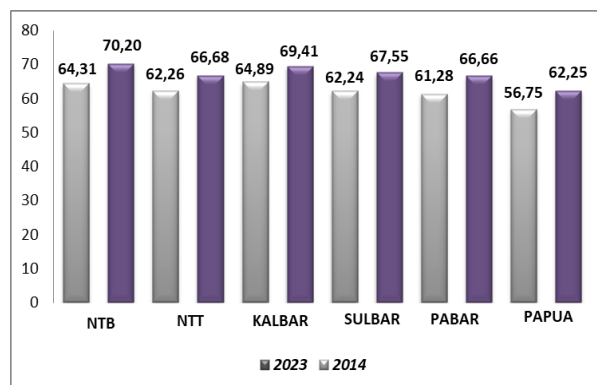
### 1. LATAR BELAKANG

Indeks pembangunan manusia (IPM) menggambarkan keberhasilan sebuah wilayah atau negara dalam mencapai pembangunan manusia. IPM (Indeks pembangunan manusia) membantu pemerintah dan organisasi dalam mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan perhatian tambahan, sehingga kebijakan pembangunan menjadi lebih efektif dan merata. Badan

pusat statistik (BPS) membagi IPM ke dalam empat kategori: 1). <60 (rendah), 2). 60-69 (sedang), 3). 70-79 (tinggi), dan 4) > 80 (sangat tinggi).

Indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Menurut badan pusat statistik (BPS), “indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia tergolong tinggi sejak tahun 2016, dengan nilai 70,18.” Pencapaian tersebut tidak berarti bahwa semua provinsi di Indonesia memiliki IPM yang tinggi. Menurut publikasi badan pusat statistik (BPS), terdapat 20 provinsi dengan status IPM sedang pada tahun 2016 dan satu provinsi dengan status IPM rendah, yaitu provinsi Papua, namun jumlah ini menurun menjadi 12 provinsi di tahun 2018 dan 11 provinsi pada tahun 2019, sementara 22 provinsi lainnya memiliki status IPM tinggi, dengan satu provinsi yang memiliki IPM sangat tinggi, yaitu provinsi DKI Jakarta (Nailufar et al., 2024).

Dari tahun 2019 hingga 2023, 5 provinsi masih berada dalam kategori IPM sedang. Provinsi-provinsi tersebut adalah Pabar (Papua Barat), Kalbar (Kalimantan Barat), NTT (Nusa Tenggara Timur), Papua, dan Sulbar (Sulawesi Barat). Grafik di bawah ini menunjukkan IPM di 5 provinsi di Indonesia antara tahun 2014 hingga 2023 dengan IPM kategori sedang.



**Sumber : BPS (2025)**

**Gambar 1. Provinsi dengan IPM kategori sedang**

Berdasarkan grafik di atas, provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengalami kenaikan IPM dari kategori sedang ke kategori tinggi dalam sepuluh tahun terakhir, khususnya mencapai angka IPM di atas 70, berbeda dengan NTT, Kalbar, Pabar, dan Papua, yang memiliki IPM di bawah 70.

Pemerintah dapat meningkatkan angka pada IPM dengan melalui kebijakan penetapan UMP. Kebijakan ini memiliki tujuan supaya pekerja memperoleh penghasilan yang memadai guna mencukupi keperluan hidup layak. Gubernur menetapkan upah minimum selaku bayaran bulanan paling rendah yang didapat masyarakat, mencakup tunjangan tetap serta upah pokok. Mengingat perbedaan tingkat kesejahteraan di setiap daerah, upah minimum diterapkan berdasarkan wilayah, bukan secara nasional (Faizin, 2024).

Selain menetapkan UMP (Upah Minimum Provinsi), menurunkan tingkatan kemiskinan dalam suatu provinsi juga memberikan kontribusi yang signifikan untuk meningkatkan IPM. Karena penurunan angka kemiskinan akan mempengaruhi IPM di suatu provinsi, (Permatasari, 2019) (Pramesti & Riyardi, 2024) melakukan penelitian dan menyimpulkan bahwa tingkat kemiskinan memiliki efek negatif yang cukup besar terhadap IPM. Tingkat kemiskinan yang tinggi membatasi akses individu terhadap fasilitas kesehatan serta pendidikan, yang merupakan elemen penting atas IPM ( Indeks Pembangunan Manusia).

Menurut Nugraha (2020), ketidakmampuan untuk mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan, serta tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai, menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran dalam angkatan kerja. Siklus pengangguran dan kemiskinan akan terus berlanjut kecuali jika ada upaya untuk memutusnya dengan menyediakan akses yang mudah terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta pengembangan lapangan kerja. Upaya pemerintah di bidang pendidikan untuk mengurangi kemiskinan tidak akan efektif tanpa diimbangi dengan kebijakan di sektor ketenagakerjaan.

Uraian dari permasalahan tersebut, membuat peneliti tertarik dalam melakukan penelitian secara mendalam terhadap ke 5 provinsi tersebut, dimana ke 5 provinsi tersebut masih tergolong sebagai provinsi dengan IPM sedang dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, berbeda dengan provinsi lain seperti Nusa Tenggara Barat yang dimana IPM Nusa Tenggara Barat sudah mencapai angka IPM di atas 70 atau termasuk IPM dengan kategori tinggi. Dengan maksud studi ini seperti ini: “Untuk mengetahui pengaruh variabel UMP, Tingkat Kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran terhadap 5 provinsi di Indonesia yang memiliki IPM sedang.”

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Indeks Pembangunan Manusia**

IPM adalah metrik multifaset yang mengevaluasi mutu hidup individu berdasarkan tiga aspek pokok: pendidikan, kesehatan, serta taraf hidup yang memadai. Dalam teori pembangunan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM) menandakan kesejahteraan individu di dalam suatu negara atau wilayah. Ide ini dicetuskan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang membagi IPM ke dalam empat kategori berdasarkan skor yang diperoleh dari terendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Di Indonesia, meningkatkan IPM merupakan tujuan utama pembangunan nasional, dan sering kali dikaitkan dengan kebijakan ekonomi dan sosial daerah (Gunawan et al., 2022).

(Za et al., 2019) juga menyatakan bahwa kemajuan manusia merupakan tujuan utama dari setiap proses pembangunan. Pembangunan manusia secara signifikan meningkatkan kemampuan suatu negara untuk mengasimilasi teknologi kontemporer dan meningkatkan potensinya untuk menciptakan lapangan kerja, sehingga mengurangi pengangguran dan mencapai pembangunan manusia yang berkelanjutan.

### **Upah Minimum Provinsi**

UMP (Upah Minimum Provinsi) sangat penting guna menjaga hak-hak pekerja dan mengurangi penyalahgunaan tenaga kerja. UMP memastikan pekerja di suatu provinsi atau wilayah menerima upah yang minimal mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Setiap tahun, pemerintah provinsi mengevaluasi dan menetapkan UMP baru. Penentuan UMP melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, perwakilan pekerja, dan perwakilan pengusaha (Alpino & Rusdi, 2024).

Menurut teori ekonomi ketenagakerjaan, upah minimum dapat berdampak pada daya beli masyarakat, yang kemudian mempengaruhi akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Menurut (Faizin, 2024), menaikkan upah minimum memiliki dampak yang baik bagi IPM karena meningkatkan kualitas hidup dengan menyediakan akses yang lebih baik terhadap kebutuhan dasar. Hipotesis ini juga menyatakan kemungkinan meningkatnya pengangguran jika upah minimum terlalu tinggi, karena perusahaan akan kesulitan untuk mempekerjakan tenaga kerja dalam jumlah besar.

### **Tingkat Kemiskinan**

Kuncoro dalam (Ekaputri et al., 2023) menyatakan bahwa ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya mengakibatkan kehidupan dalam kemiskinan. Akibatnya, seseorang yang tak dapat mencukupi keperluan mendasar dan hidup layak dapat dikategorikan sebagai orang miskin.

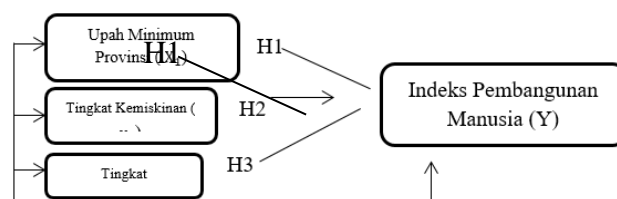
Menurut teori kemiskinan struktural, kemiskinan disebabkan bukan hanya oleh kurangnya pendapatan, tetapi juga oleh minimnya akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, yang merupakan elemen penting dalam IPM. Penelitian oleh (Permatasari, 2019), dan (Pramesti & Riyardi, 2024) menunjukkan bahwa “tingkat kemiskinan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap IPM, di mana tingkat kemiskinan yang lebih tinggi mengurangi akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.” Hal ini membatasi kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesehatan secara keseluruhan.

## Tingkat Pengangguran

Dalam indikator tenaga kerja, pengangguran didefinisikan sebagai orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan atau bersiap untuk memulai membuka usaha baru. Demikian pula, pengangguran juga mencakup orang-orang yang tak mencari pekerjaan sebab telah diterima namun belum mulai bekerja. Pasar tenaga kerja mengacu pada kegiatan apa pun yang dilakukan oleh para pelaku yang menghubungkan pencari kerja dengan lowongan pekerjaan atau memenuhi permintaan dan penawaran tenaga kerja (Simbala et al., 2024).

Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menghambat peningkatan IPM, karena pengangguran menyebabkan berkurangnya pendapatan rumah tangga, yang kemudian berdampak pada akses pada keperluan mendasar contohnya kesehatan serta pendidikan. Teori pasar tenaga kerja menyatakan bahwa pengangguran dapat muncul dari kesenjangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja, serta kurangnya keterampilan yang diperlukan untuk pasar kerja. Penelitian (Nugraha, 2020) menyoroti bahwa ketidakmampuan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak meningkatkan jumlah pengangguran yang berdampak negatif pada IPM.

Berdasarkan penjelasan teori sebelumnya, maka dibuatlah kerangka konseptual penelitian dibawah ini.



Sumber : Olah Data (2025)

**Gambar 2. Kerangka Konsep Penelitian**

- H1 : Upah minimum provinsi ( $X_1$ ) diduga mempunyai dampak positif signifikan kepada indeks pembangunan manusia ( $Y$ ).
- H2 : Tingkat kemiskinan ( $X_2$ ) diduga mempunyai dampak negatif signifikan kepada indeks pembangunan manusia ( $Y$ ).
- H3 : Diduga tingkat pengangguran ( $X_3$ ) mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia ( $Y$ ).
- H4 : Upah minimum provinsi, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran diduga secara bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

### 3. METODE PENELITIAN

Karena penelitian ini memakai data dengan banyak objek dan rentang waktu , jadi penelitian ini regresi data panel dengan rentang waktu dari tahun 2014 hingga 2023, dan objek penelitian di 5 provinsi dengan IPM sedang di Indonesia. Data statistik yang dipakai ialah data sekunder yang berasal dari publikasi BPS. Variabel tak bebas yang dipakai terdiri dari UMP (Upah Minimum Provinsi), tingkat kemiskinan (TK), serta TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka), sedangkan variabel terikatnya ialah IMP (Indeks Pembangunan Manusia). Data panel diimplementasikan untuk meneliti pengaruh UMP, TK, dan TPT terhadap IPM di lima provinsi di Indonesia yang termasuk dalam kelas IPM menengah. Model persamaan regresi informasi panel yang dimanfaatkan ialah seperti dibawah ini.

$$IPM_{it} = \alpha + \beta_1 UMP_{it} + \beta_2 TK_{it} + \beta_3 TPT_{it} + e$$

Ket:

IPM adalah indeks pembangunan manusia, UMP adalah upah minimum provinsi, TK adalah tingkat kemiskinan, TPT adalah tingkat pengangguran.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Uji Regresi Data Panel

#### Uji Chow

**Tabel 1. Hasil Uji Chow**

Redundant Fixed Effects Tests			
Pool: POOL01			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	242.030717	(4,42)	0.0000
Cross-section Chi-square	159.007882	4	0.0000

**Sumber : Estimate Eviews (2025)**

Nilai probabilitas chi-square ialah 0.0000. Angka ini kurang dari 0,05, yang mengindikasikan bahwa jika peluang chi-square berada di bawah 0,05, sehingga FEM ialah model yang paling tepat.

## Uji Hausman

**Tabel 2. Hasil Uji Hausman**

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Pool: POOL01  
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	85.766099	3	0.0000

**Sumber : Estimate Eviews (2025)**

Nilai p-value adalah 0,0002, jauh lebih kecil dibandingkan 0,05. Temuan dari Hausman memperlihatkan bahwasanya model yang paling berguna yang dipakai pada studi ini ialah FEM. Dalam regresi data panel, dalam menentukan model yang paling sesuai harus melalui tiga langkah: Uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Sebab hasil dari uji Chow dan Hausman memperlihatkan bahwasanya model FEM adalah model yang paling selaras, guna uji Lagrange Multiplier tak diperlukan lagi.

Setelah melaksanakan analisis regresi data panel, dilaksanakan uji asumsi klasik, yakni uji normalitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas. Namun, menurut Basuki dalam (Awaludin et al., 2023), “uji autokorelasi tidak diperlukan dalam analisis regresi data panel karena data panel bersifat cross-sectional, sementara autokorelasi biasanya terjadi pada data time series. Selain itu, uji normalitas juga dianggap opsional.” Oleh karena itu, penelitian ini hanya menerapkan dua uji, yaitu uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas.

## Uji Asumsi Klasik

### Uji multikolinearitas

**Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas**

	UMP	TK	TPT
UMP	1.000000	0.315661	0.121585
TK	0.315661	1.000000	0.070453
TPT	0.121585	0.070453	1.000000

**Sumber : Estimate Eviews (2025)**

Dari hasil di atas menunjukkan bahwa model ini terbebas dari masalah multikolinieritas, yang dapat dilihat dari harga antar variabel yang kurang dari nol. Setelah selesai melakukan uji multikolinearitas, selanjutnya dilakukan uji heteroskedastisitas sebagai berikut:

## Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.453808	0.771705	0.588059	0.5596
UMP	7.26E-08	7.74E-08	0.938475	0.3534
TK	-0.021543	0.035528	-0.606370	0.5475
TPT	0.009773	0.042540	0.229741	0.8194
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.282749	Mean dependent var	0.275787	
Adjusted R-squared	0.163207	S.D. dependent var	0.195137	
S.E. of regression	0.178504	Akaike info criterion	-0.462762	
Sum squared resid	1.338278	Schwarz criterion	-0.156838	
Log likelihood	19.56905	Hannan-Quinn criter.	-0.346264	
F-statistic	2.365275	Durbin-Watson stat	1.756790	
Prob(F-statistic)	0.039318			

**Sumber : Estimate Eviews (2025)**

Hasil di atas menunjukkan bahwa nilai prob. untuk UMP ialah 0,35 ( $> 0,05$ ), TK ialah 0,54 ( $> 0,05$ ), dan untuk TPT adalah 0,881 ( $> 0,05$ ). Hal ini memperlihatkan bahwasanya tak terjadi heteroskedastisitas dalam studi ini, karena nilai prob. dari variabel tidak bebas semuanya  $> 0,05$ . Model yang dipakai pada penelitian ini ialah FEM.

## Hasil Regresi Data Panel

**Tabel 5. Hasil Model FEM**

Dependent Variable: IPM? Method: Pooled Least Squares Date: 10/04/24 Time: 02:34 Sample: 1 10 Included observations: 10 Cross-sections included: 5 Total pool (balanced) observations: 50				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	57.32597	1.588262	36.09353	0.0000
UMP?	3.28E-06	1.59E-07	20.57883	0.0000
TK?	-0.010164	0.073122	-0.139000	0.8901
TPT?	-0.180373	0.087552	-2.060166	0.0456
Fixed Effects (Cross)				
KALBAR-C	3.928360			
NTT-C	2.442999			
PABAR-C	-0.813293			
PAPUA-C	-6.606788			
SULBAR-C	1.048722			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.986572	Mean dependent var	64.04920	
Adjusted R-squared	0.984334	S.D. dependent var	2.935255	
S.E. of regression	0.367383	Akaike info criterion	0.980824	
Sum squared resid	5.668760	Schwarz criterion	1.286748	
Log likelihood	-16.52061	Hannan-Quinn criter.	1.097322	
F-statistic	440.8388	Durbin-Watson stat	0.941205	
Prob(F-statistic)	0.000000			

**Sumber : Estimate Eviews (2025)**

Berikut adalah persamaan regresi dalam penelitian ini:  $IPMit = 57,32 + 3,28 UMPit - 0,01 TKit - 0,18 TPTit$ .

1. Konstanta dengan nilai 57,32 menunjukkan bahwa jika upah minimum provinsi (UMP), tingkat kemiskinan (TK), serta tingkat pengangguran (TPT) tetap, maka IPM (Indeks Pembangunan Manusia) akan tetap berada dalam angka 57,32%.
2. Koefisien upah minimum provinsi (UMP) sebesar 3,28 menunjukkan pengaruh positif, artinya tiap-tiap kenaikan UMP (Upah Minimum Provinsi) sebesar 1 juta akan meningkatkan IMP (Indeks Pembangunan Manusia) sejumlah 3,28%, dengan asumsi tingkat kemiskinan (TK) dan tingkat pengangguran konstan.



3. Koefisien regresi tingkat pengangguran (TPT) sejumlah -0,18 memperlihatkan pengaruh negatif, yang berarti bahwa setiap peningkatan 1% tingkat pengangguran (TPT) akan menurunkan IMP (Indeks Pembangunan Manusia) sejumlah -0,18%, dengan asumsi bahwa UMP (Upah Minimum Provinsi) dan variabel tingkat kemiskinan (TK) konstan.

### Uji T

1. Berdasarkan hasil perhitungan t-statistik secara keseluruhan, t-statistik bagi variabel UMP (Upah Minimum Provinsi) ialah sejumlah 20,57 dengan prob. 0,000. Hal ini mengindikasikan bahwa upah minimum provinsi (UMP) berdampak secara signifikan kepada IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di lima provinsi di Indonesia pada tingkat  $\alpha = 5\%$ .
2. Nilai t-statistik untuk tingkat kemiskinan (TK) adalah -0.139 dengan prob. 0.89, yang memperlihatkan bahwasanya tingkat kemiskinan (TK) tidak mempunyai dampak yang signifikan kepada IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dalam lima provinsi di Indonesia pada tingkat  $\alpha = 5\%$ .
3. Selanjutnya, t-statistik untuk tingkat pengangguran (TPT) adalah -2,060 dengan prob. 0,45. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pengangguran (TPT) mempunyai dampak negatif signifikan atas IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dalam lima provinsi di Indonesia di tingkat  $\alpha = 5\%$ .

### Uji F

Nilai F-Statistik sebesar 440.8388 dengan nilai prob. 0.000. nilai prob. F-Statistik kurang dari 0.05, disimpulkan bahwa upah minimum provinsi (UMP), tingkat kemiskinan (TK), dan tingkat pengangguran (TPT) secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di 5 provinsi di Indonesia.

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Nilai *R-Squared* yang didapatkan ialah sejumlah 0.986572, yang menunjukkan bahwa dampak UMP (Upah Minimum Provinsi), tingkat kemiskinan (TK), serta tingkat pengangguran (TPT) pada indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 98.65%. Sisanya sebesar 1,35% dipengaruhi oleh variabel lain yang tak dimasukkan kepada studi ini.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap IPM**

Nilai koefisien sejumlah 3,28 pada prob. sebesar 0,000. Bahwasanya UMP memiliki pengaruh yang signifikan serta positif pada IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Dari temuan ini bahwa kenaikan upah minimum provinsi bisa menumbuhkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan, yang kemudian berpengaruh kepada kesejahteraan hidup. Temuan ini sejalan pada penelitian yang dilakukan oleh (Gunawan et al., 2022), (Putri et al., 2024), (Faizin, 2024). Dengan demikian, kebijakan pemerintah menaikkan UMP berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

Kebijakan tersebut dikelola pada UU No. 13/2003 mengenai Ketenagakerjaan yakni pada pasal 89 ayat (3), “Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi mereka”. Penetapan UMP ialah guna menjamin agar upah tidak mengalami penurunan yang akan mengakibatkan kesenjangan dalam ekonomi. Penetapan UMP harus sesuai dengan keinginan masyarakat, mulai dari kebutuhan sandang, pangan, dan keinginan keluarga.

### **Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap IPM**

Nilai koefisien -0,010 dan probabilitas 0,890. Bahwa tingkat kemiskinan tidak berdampak dengan signifikan kepada IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Hasil studi tersebut sesuai pada hasil studi dari (Faizin, 2024; Mononimbar et al., 2022). Namun, dilihat dari hasil penelitian dari (Wulandari & Rambe, 2024), (Mardaniswara, 2024), (Za et al., 2019) Menunjukkan hasil yang berbeda di mana tingkat kemiskinan memberikan dampak yang signifikan serta negatif kepada indeks pembangunan manusia.

Perbedaan ini dipengaruhi oleh banyak komponen, di mana penanggulangan kemiskinan tidak secara langsung mempengaruhi IPM suatu daerah, sehingga setiap daerah memiliki hasil yang berbeda. Karena pengaruh kemiskinan terhadap IPM dapat bervariasi antar daerah, maka pemerintah perlu merancang kebijakan yang sesuai dengan karakteristik daerah tertentu. Sebagai contoh, di daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, fokus kebijakan mungkin lebih kepada pengentasan kemiskinan secara langsung. Sedangkan di daerah dengan IPM yang rendah namun tingkat kemiskinannya tidak terlalu tinggi, fokus kebijakannya dapat berupa peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Perbedaan hasil penelitian tersebut dapat menjadi masukan untuk memodifikasi pendekatan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

### **Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap IPM**

Nilai koefisien  $-0,180$  dan probabilitas  $0,0456$ . Bahwasanya tingkat pengangguran mempunyai dampak yang signifikan serta negatif kepada indeks pembangunan manusia (IPM), karena pengangguran mencerminkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif. Temuan atas studi ini selaras pada temuan penelitian dari (Soekapdjo & Oktavia, 2021), (Simbala et al., 2024), (Putri et al., 2024). Pengangguran yang berkepanjangan dapat menyulitkan masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka, karena kurangnya sumber daya ekonomi, pengangguran dapat menyebabkan stres, ketidakpastian, dan masalah kesehatan mental. Selain itu, akses terhadap layanan kesehatan juga berkurang karena keterbatasan biaya.

Program pelatihan kemampuan dan sertifikasi bagi pekerja, khususnya bagi pekerja muda, harus ditingkatkan. hal ini sangatlah penting untuk pekerja guna memenuhi kebutuhan pasar yang berubah dan beradaptasi dengan teknologi baru. Pendanaan yang besar untuk pendidikan, mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi, beserta memastikan akses yang adil bagi semua kelompok masyarakat, yang dimana akan meningkatkan kualitas SDM dan dapat mengurangi pengangguran dalam jangka panjang. Pemerintah dapat memberikan insentif bagi usaha kecil dan menengah, seperti kemudahan dalam memperoleh modal, pendampingan usaha, dan pendidikan kewirausahaan. hal ini dapat mengurangi ketergantungan pada pekerjaan formal dan menciptakan lapangan kerja baru, terutama di daerah-daerah dengan indeks pembangunan manusia yang rendah atau sedang.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari penelitian ini bahwa variabel UMP memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap IPM di 5 provinsi dengan IPM menengah di Indonesia. Kenaikan UMP meningkatkan kesejahteraan individu dengan meningkatkan pendapatan. Tingkat pengangguran mempunyai dampak yang signifikan serta negatif pada IPM, yang menunjukkan bahwa penurunan tingkat pengangguran akan menghasilkan peningkatan pada IPM. Meskipun demikian, tingkat kemiskinan tak mempunyai dampak signifikan kepada IPM, yang mengindikasikan bahwa pengurangan kemiskinan tidak secara substansial meningkatkan IPM di wilayah-wilayah ini.

Pemerintah perlu terus mendorong kebijakan peningkatan upah minimum provinsi secara bertahap untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di provinsi-provinsi dengan IPM menengah. Dan perlu adanya program pelatihan keterampilan untuk mengurangi tingkat pengangguran, terutama di kalangan angkatan kerja muda, sehingga dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan berkontribusi terhadap IPM.

## DAFTAR REFERENSI

- Alpino, M. A., & Rusdi, M. (2024). Analysis of factors that influence the provincial minimum wage in SUMBAGSEL. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1). <https://doi.org/10.37676/ekombis.v12i1.4960>
- Apriska, L., Irwan, M., Suprapti, I. A. P., & Anggara, J. (2024). Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia (Kabupaten/Kota di Provinsi NTB). *JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA*, 10(1), 1–11. <https://doi.org/10.29303/jseh.v10i1.451>
- Awaludin, M., Maryam, St., & Firmansyah, M. (2023). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada sektor industri kecil dan menengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Konstanta*, 2(1), 156–174. <https://doi.org/10.29303/konstanta.v2i1.461>
- Dwi Prasetyo, K., & Arifin, Z. (2022). Analisis pengaruh TPT, UMP, pertumbuhan ekonomi, IPM terhadap jumlah penduduk miskin Pulau Jawa: Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 6(2), 295–303. <https://doi.org/10.22219/jie.v6i2.20626>
- Ekaputri, R. A., Barika, B., Azansyah, A., & Zulyanto, A. (2023). Analysis of economic growth, agglomeration and poverty in Southern Sumatera. *Equity: Jurnal Ekonomi*, 11(1), 36–45. <https://doi.org/10.33019/equity.v11i1.136>
- Faizin, M. (2024). Pengaruh upah minimum, kemiskinan dan pengangguran pada IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*. <https://ejurnalunsam.id/index.php/jseb/article/view/3027>
- Fitirani, S., & Harahap, E. F. (2021). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, pengangguran dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat (Tahun 2015-2019). *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Economics, Bung Hatta University*, 19(3), Article 3. <https://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php/JFEK/article/view/19819>
- Gunawan, R. G. (2022). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan upah minimum regional terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Pulau Sumatra. *Pareto: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 5(1), 125–142.
- Hauzan, A., Yulmardi, Y., & Hardiani, H. (2021). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan pengeluaran pemerintah, pengangguran dan pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 10(3), Article 3. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v10i3.16496>
- Hidayat, N., Nugrahadhi, E. W., Rahman, H., & Daoni, F. (2023). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan upah minimum terhadap angka pengangguran di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 18(2), Article 2. <https://doi.org/10.55981/jki.2023.1074>

- Mardaniswara, M. R. (2024). Analisis pengaruh upah minimum, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Bali [Undergraduate, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur]. <https://repository.upnjatim.ac.id/20156/>
- Mononimbar, T. Y., Lopian, A. L. C. P., & Tolosang, K. D. (2022). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah dan tingkat kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(3), Article 3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/40500>
- Nailufar, F., Juliansyah, H., Murtala, M., & Risna, R. (2024). Pengaruh upah minimum provinsi (UMP), penanaman modal asing (PMA), dan produk domestik regional bruto (PDRB), terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia (Studi kasus 11 provinsi IPM lower medium). *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.29103/jeru.v7i1.17760>
- Nugraha, D. P. (2020). Kemiskinan di Kota Bengkulu, Apa Penyebabnya?. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 20(1), 31-37.
- Permatasari, V. B. D. (2019). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran, upah minimum terhadap kemiskinan di Jawa Timur tahun 2012-2017 [Sarjana, Universitas Brawijaya]. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/174663/>
- Pramesti, M. D., & Riyardi, A. (2024). Determinan kemiskinan: Studi kasus 10 Kota/Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2017-2022. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(3), Article 3. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i3.5635>
- Putri, M. R., Ridla, M. A., & Azise, N. (2024). Pengaruh tingkat kemiskinan tingkat pengangguran upah minimum kabupaten/kota dan laju pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau. *Jurnal Cybernetic Inovatif*, 8(6), Article 6. <https://jurnalhost.com/index.php/jci/article/view/1250>
- Radityana, I. D. G. M., Djayastra, I. K., Danendra, A. A. N. B., & Wisnu, N. (2023). Pengaruh upah minimum, indeks pembangunan manusia dan pengangguran terbuka terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Bali. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Manajemen Indonesia (JKEMI)*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.61079/jkemi.v1i1.3>
- Sania, L., Balafif, M., & Imamah, N. (2021). Pengaruh PDRB, tingkat pengangguran terbuka dan UMR terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur. *Bharanomics*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.46821/bharanomics.v2i1.189>
- Simbala, M., Walewangko, E. N., & Niode, A. O. (2024). Pengaruh upah minimum provinsi, pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia terhadap jumlah pengangguran di Bolaang Mongondow Raya. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 24(3), Article 3.

- Soekapdjo, S., & Oktavia, M. R. (2021). Pengaruh inflasi, indeks pembangunan manusia, dan upah minimum provinsi terhadap pengangguran di Indonesia. *Jurnal Ecodemica Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 5(2), 94–102. <https://doi.org/10.31294/eco.v5i2.10070>
- Wulandari, F., & Rambe, R. A. (2024). Impact of the human development index, economic growth, investment, and government expenditure on the poverty of districts and cities in Bengkulu Province. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), Article 1. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v12i1.4913>
- Za, D. F., Junaidi, J., & Bhakti, A. (2019). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran terbuka terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi-provinsi di Sumatera. *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan*, 8(3), Article 3. <https://doi.org/10.22437/jels.v8i3.11994>